

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017**

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT									
NO	JUDUL	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	Link
					CETAK	REKAM	ONLINE		
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan. 1. DIP Yang Wajib Diumumkan; 2. DIP Yang Wajib Disediakan Setiap Saat.	Biro Pemberitaan Parlemen / PPID	2017		√	√	1 tahun	
2.	Undang-undang	UU dari tahun 1945 - 2017	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	1945 - 2017		√	√	Selama Berlaku	
3.	Peraturan DPR	Peraturan DPR dari tahun 1 No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional 2 No.3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib 3 No.1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI 4 No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI 5 No.3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik 6 No.4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan 7 No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib 8 No.3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 9 No.2 Tahun 2014 Tentang Tim Pengawas intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 10 No.1 Tahun 2013 Tentang Peliputan Pers di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 11 No.1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional 12 No.2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang 13 No.3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang 14 No.01 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 15 No.02 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI 16 No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPR RI 17 No.2 Tahun 2010 Tentang Peraturan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 18 No.01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009		√ √	√ √	Selama Berlaku Selama Berlaku	http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr13_2016_2.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr18_2016_3.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr10_2015_1.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr11_2015_2.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr12_2015_3.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr17_2015_4.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr8_2014_1.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr9_2014_3.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr21_2014_2.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr20_2013_1.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr5_2012_1.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr6_2012_2.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr7_2012_3.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr3_2011_1.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr4_2011_02.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr2_2010_1.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr2_2010_2.pdf http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr1_2009_1.pdf
4.	Risalah Pembahasan Undang-undang	1 Undang-Undang No 7 Tahun 1953 Tentang Anggota Konstituante Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Risalah) 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1955 Tentang Undang-Undang Darurat (Risalah) 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Risalah) 4 Undang-Undang No 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Risalah) 5 Undang-Undang No 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Risalah) 6 Undang-Undang No 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian (Draf) 7 Undang-Undang No 17 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang (Risalah) 8 Undang-Undang No 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Atau Perwakilan Rakyat (Risalah) 9 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Risalah)	Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi	1953 1955 1960 1964 1964 1965 1965 1969 1971		√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √			

10	Undang-Undang No 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1971	v
11	Undang-Undang No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1974	v
12	Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1974	v
13	Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1974	v
14	Undang-Undang No 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1975	v
15	Undang-Undang No 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan & Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kuhp Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan & Kejahatan Terhadap Sarana Penerbangan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1979	v
16	Undang-Undang No 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1976	v
17	Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1979	v
18	Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1979	v
19	Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1982	v
20	Undang-Undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1982	v
21	Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1983	v
22	Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1984	v
23	Undang-Undang No 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Undang-Undang No3 Tahun 1975 Ttg Partai Politik Dan Golongan Karya (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1985	v
24	Undang-Undang No 12 Tahun 1985 Tentang Perubahan Pajak Bumi Dan Bangunan 1994 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1985	v
25	Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1985	v
26	Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1985	v
27	Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1986	v
28	Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1990	v
29	Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1992	v
30	Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1992	v
31	Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1992	v
32	Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1995	v
33	Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1995	v
34	Undang-Undang No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1995	v
35	Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1995	v
36	Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1995	v
37	Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1995	v
38	Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1996	v
39	Undang-Undang No 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk li Bekasi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1996	v
40	Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
41	Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
42	Undang-Undang No 6 Tahun 1997 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997-1998 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
43	Undang-Undang No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
44	Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
45	Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
46	Undang-Undang No 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
47	Undang-Undang No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
48	Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangann Berjangka Komoditi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1997	v
49	Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Ttg Kepaliltan Menjadi Undang-Undang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1998	v

50	Undang-Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanut Usia (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1998	v
51	Undang-Undang No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
52	Undang-Undang No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
53	Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Tentang Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
54	Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
55	Undang-Undang No 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
56	Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
57	Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
58	Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
59	Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
60	Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
61	Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
62	Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
63	Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
64	Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
65	Undang-Undang No 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	1999	v
66	Undang-Undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buo, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
67	Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
68	Undang-Undang No 22 Tahun 2000 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998 Dan 1999 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
69	Undang-Undang No 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
70	Undang-Undang No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
71	Undang-Undang No 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
72	Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
73	Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
74	Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
75	Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
76	Undang-Undang No 36 Tahun Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
77	Undang-Undang No 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2000	v
78	Undang-Undang No 11 Tahun 2001 Pembentukan Kota Batu (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
79	Undang-Undang No 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
80	Undang-Undang No 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
81	Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
82	Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Y A Y A S A N (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
83	Undang-Undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
84	Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v

85	Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
86	Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2001	v
87	Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
88	Undang-Undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
89	Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
90	Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
91	Undang-Undang No 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
92	Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
93	Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
94	Undang-Undang No 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
95	Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
96	Undang-Undang No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
97	Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2002	v
98	Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
99	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
100	Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
101	Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
102	Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
103	Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
104	Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
105	Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
106	Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
107	Undang-Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
108	Undang-Undang No 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2003	v
109	Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
110	Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
111	Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
112	Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
113	Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
114	Undang-Undang No 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
115	Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
116	Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
117	Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
118	Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
119	Undang-Undang No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
120	Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
121	Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v

122	Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
123	Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
124	Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
125	Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
126	Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
127	Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
128	Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
129	Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
130	Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
131	Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
132	Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
133	Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2004	v
134	Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2005	v
135	Undang-Undang No 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perppu No 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2005	v
136	Undang-Undang No 10 Tahun 2005 Penetapan Perpu No 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nad Dan Kepulauan Nias Prov. Sumatra Utara Menjadi Uu (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2005	v
137	Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik 9risalah)	Pusat Data dan Informasi	2005	v
138	Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2005	v
139	Undang-Undang No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
140	Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
141	Undang-Undang No 5 Tahun 2006 Tentang Pengesaha (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
142	Undang-Undang No 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
143	Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
144	Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
145	Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
146	Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
147	Undang-Undang No 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
148	Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2006	v
149	Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 Sampai 2025 9 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2007	v
150	Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2007	v
151	Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2007	v
152	Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2007	v
153	Undang-Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2007	v
154	Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2007	v
155	Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2007	v

156	Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
157	Undang-Undang No 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 Ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Ttg Pemilihan Gub, Bupati & Walikota Menjadi Undang-Undang (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
158	Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
159	Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
160	Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
161	Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
162	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
163	Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang P E L A Y A R A N (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
164	Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
165	Undang-Undang No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
166	Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
167	Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
168	Undang-Undang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
169	Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
170	Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
171	Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2008	v
172	Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
173	Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Ma (Na)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
174	Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
175	Undang-Undang No 6 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu Nomor 2 Thn 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomer 23 Thn 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Uu (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
176	Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
177	Undang-Undang No 20 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
178	Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahas Dan Lambang Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
179	Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
180	Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
181	Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
182	Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
183	Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
184	Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
185	Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
186	Undang-Undang No 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
187	Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2009	v
188	Undang-Undang No 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2010	v
189	Undang-Undang No 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2010	v
190	Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2010	v
191	Undang-Undang No 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2010	v
192	Undang-Undang No 13 Tahun 2010 Tentang Holtikultura (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2010	v
193	Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
194	Undang-Undang No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v

195	Undang-Undang No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
196	Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
197	Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
198	Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
199	Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
200	Undang-Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
201	Undang-Undang No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
202	Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
203	Undang-Undang No 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
204	Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2011	v
205	Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Penggadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2012	v
206	Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2012	v
207	Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2012	v
208	Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2012	v
209	Undang-Undang No 14 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2012	v
210	Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2012	v
211	Undang-Undang No 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2012	v
212	Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Na, Risalah, Draf)	Pusat Data dan Informasi	2013	v
213	Undang-Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2013	v
214	Undang-Undang No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2013	v
215	Undang-Undang No 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2013	v
216	Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
217	Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Risalah, Draf)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
218	Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
219	Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
220	Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Na, Risalah, Draf)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
221	Undang-Undang No 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
222	Undang-Undang No 21 2014 Tentang Panas Bumi (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
223	Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
224	Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
225	Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
226	Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2014	v
227	Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, & Walikota Menjadi Undang-Undang	Pusat Data dan Informasi	2015	v
228	Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Risalah, Draf)	Pusat Data dan Informasi	2015	v
229	Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Na, Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2016	v
230	Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Risalah)	Pusat Data dan Informasi	2016	v

5.	Naskah Akademik Rancangan UU	<p>1 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Na, Risalah)</p> <p>2 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Na, Risalah)</p> <p>3 Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Na)</p> <p>4 Undang-Undang No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Na, Risalah)</p> <p>5 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Na, Risalah)</p> <p>6 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Na, Risalah)</p> <p>7 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Na, Risalah)</p> <p>8 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Risalah)</p> <p>9 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Na)</p> <p>10 Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Na)</p> <p>11 Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Na, Risalah)</p> <p>12 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Na, Risalah)</p> <p>13 Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Prubahan Kedua Atas Uu Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Ma (Na)</p> <p>14 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Na, Risalah)</p> <p>15 Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Na, Risalah)</p> <p>16 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Na)</p> <p>17 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Na)</p> <p>18 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Na, Risalah)</p> <p>19 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Penggadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Na, Risalah)</p> <p>20 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Na)</p> <p>21 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Na, Risalah, Draf)</p> <p>22 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Na, Risalah)</p> <p>23 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Na, Risalah)</p> <p>24 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Na, Risalah, Draf)</p> <p>25 Undang-Undang No 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian (Na)</p> <p>26 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Na)</p> <p>27 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Na, Risalah)</p> <p>28 Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Na, Risalah)</p>	<p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p> <p>Pusat Data dan Informasi</p>	<p>1966</p> <p>1997</p> <p>2002</p> <p>2002</p> <p>2003</p> <p>2004</p> <p>2004</p> <p>2004</p> <p>2004</p> <p>2004</p> <p>2004</p> <p>2008</p> <p>2008</p> <p>2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2016</p> <p>2016</p>	<p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p>			
6.	Memorandum Of Understanding (MOU) DPR RI 2013 - 2017	<p>1 Memorandum of Understanding between the House of Representative of the Republic of Indonesia and the National Assembly of the Republic of Serbia on Inter - Parliamentary Cooperation</p> <p>2 Joint Statement by the Members of the Parliamentary Friendship Group and Reciprocal Cooperation Ecuador - Indonesia's of the National Assembly of Ecuador</p> <p>3 Memorandum of Understanding between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the National Assembly of the Republic of Belarus</p> <p>4 Memorandum of Understanding between the Parliament of the Republic of Vanuatu and the House of Representatives of the Republic of Indonesia on Inter - Parliamentary Partnership Program</p>	<p>Biro Kerja Sama Antar Parlemen</p> <p>Biro Kerja Sama Antar Parlemen</p> <p>Biro Kerja Sama Antar Parlemen</p> <p>Biro Kerja Sama Antar Parlemen</p>	<p>18-Mar-13</p> <p>08-Jul-13</p> <p>04-Mei-13</p> <p>12-Nov-14</p>	<p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p>			

		5 Memorandum of Understanding on Cooperation Between the State Great Hural of Mongolia and the House of Representatives of the Republic of Indonesia 6 Memorandum of Understanding Between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Council of Representatives of the Kingdom of Bahrain	Biro Kerja Sama Antar Parlemen Biro Kerja Sama Antar Parlemen	22-Feb-16 30-Mar-17		√ √			
7.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	1 Penyaluran Delegasi Masyarakat Yang Bersurat 2 Penyaluran Delegasi Masyarakat Tanpa Surat 3 Persiapan Dan Pelaksanaan Penerimaan Tamu Edukasi 4 Pelayanan Informasi Publik 5 Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 6 Pengajuan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Protokol Biro Protokol Biro Pemberitaan Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen / PPID Biro Pemberitaan Parlemen / PPID Biro Pemberitaan Parlemen / PPID	2016 2016 2017 2017 2017 2017		√ √ √ √ √ √		Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku	
8.	Laporan keuangan Audited BPK dari 2013 - 2015	Laporan terdiri dari: ◊ Realisasi anggaran ◊ Neraca ◊ laporan Operasional ◊ Laporan Perubahan Ekuitas ◊ Catatan Atas Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	2013 - 2015		√			
9.	Rencana Strategis DPR 2015-2019	Renstra DPR terdiri dari: ◊ Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi Utama dan Nilai-Nilai dasar ◊ Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan' ◊ Target Kinerja	Sekretaris Jenderal	2015		√		Selama Berlaku	
10.	Pedoman Organisasi	Terdiri dari: No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI No. 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Kepegawaian dan Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi	2016 2016		√ √		Selama Berlaku Selama Berlaku	
11.	Profil Lengkap Pimpinan	Profil lengkap Pimpinan DPR Periode 2014 - 2019, berisi: Nama Sejarah karir Sejarah Pendidikan Penghargaan Pengalaman Organisasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi	2014		√	√		http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Pimpinan

Jakarta, Februari 2017
Ketua PPID DPR RI
ttd,
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
Nip. 196507051991031003